

---

# RENCANA AKSI KEGIATAN

---

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR  
TAHUN 2020 - 2024



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Tahun 2020 - 2024. RAK ini berisi informasi tentang uraian rencana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2020 - 2024.

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Denpasar tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisikan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar tahun 2020 - 2024 berdasar pada tugas pokok dan fungsi yang pembiayaannya dialokasikan dalam dokumen DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini dapat membantu dalam pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, dan diharapkan masukan-masukan atau saran serta kritik yang membangun dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



Denpasar, 12 September 2022

Kepala Kantor

**Dr. Anas Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH**

NIP. 196703031991022001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Kondisi Umum .....	5
B. Potensi dan Tantangan .....	8
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS .....	0
A. Visi dan Misi .....	0
B. Tujuan Strategis .....	1
C. Sasaran Strategis .....	2
D. Indikator Kinerja .....	2
E. Arah Kebijakan dan Strategi .....	4
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN .....	7
A. Kerangka Logis .....	7
B. Rencana Kegiatan .....	8
C. Kerangka Kelembagaan .....	21
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM .....	24
A. Pemantauan .....	24
B. Evaluasi .....	24
C. Pengendalian .....	24
BAB IV PENUTUP .....	25
Lampiran 1 .....	26
Lampiran 2 .....	27
Lampiran 3 .....	29
Lampiran 4 .....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anlisa <i>Crosscutting</i> Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan, Altifitas dan Pelaksana KKP Kelas I Denpasar .....	0
Tabel 2. Indikator Kinerja KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024 .....	2
Tabel 3. Target Kinerja KKP Kelas I Denpasar tahun 2022-2024.....	9
Tabel 4. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2022-2024 .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan KKP Kelas I Denpasar ...	7
Gambar 2. <i>Cascading</i> Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas I Denpasar.....	8
Gambar 3. Struktur Organisasi KKP Kelas I Denpasar tahun 2022 .....	21

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Akibat semakin menyebarnya COVID-19 yang telah melewati lintas benoa. mengakibatkan berbagai Negara melakukan karantina wilayah. Di Indonesia sendiri, kasus konfirmasi COVID-19 pertama terjadi di awal Maret 2020 yang berlokasi di Jakarta. Dengan terdapatnya kasus konfirmasi pertama dan pemulangan PMI yang tidak disertai dengan prosedur pengawasan karantina mandiri secara ketat, mengakibatkan telah terjadi transmisi lokal di berbagai wilayah di Indonesia khususnya daerah Jawa dan Bali. Hal ini mengakibatkan diberlakukan pembatasan mobilitas pelaku perjalanan yang masuk/keluar di Provinsi Bali sampai bulan Desember 2021. Penapisan pelaku perjalanan yang datang dan berangkat di pelabuhan/ bandara wilker KKP Kelas I Denpasar terdiri dari penumpang atau crew yang tiba/berangkat di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar. Penafisan diutamakan untuk pelaku perjalanan yang tiba dari Negara terjangkit atau wilayah terjangkit di dalam negeri (Domestik) dan luar negeri (Internasional). Adapun jumlah pelaku perjalanan baik yang datang maupun keluar yang ditapis di pintu masuk pada tahun 2021 sebanyak 8.154.324 orang, yang terdiri dari 4.012.987 orang pelaku perjalanan yang datang, berikutnya 4.124.660 orang pelaku perjalanan yang berangkat, diikuti 348 orang Pelaku Perjalanan Internasional di Hotel Karantina /Lokasi Karantina, serta 324 orang yang kegiatan pemeriksaan kegiatan Surveilans Migrasi Malaria, dan 16.005 orang kegiatan Pengawasan Masyarakat di Pelabuhan/Bandara. Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina yang terdiri dari penumpang, ABK / Crew (WNI dan WNA) sign of yang datang di pintu masuk wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar diwajibkan menjalankan karantina di hotel karantina. Dari kegiatan pengawasan dilakukan pada Pelaku Perjalan Internasional yang menjalankan karantina di hotel karantina tidak ditemukan yang memiliki gejala

demam/flu/sakit tenggorokan. Jumlah Pelaku Perjalanan Internasional di tahun 2021 sebanyak 348 orang ABK/crew change off yang paling terbanyak ialah 322 orang pelaku perjalanan datang di Pelabuhan Laut Benoa, berikutnya 14 orang crew off datang di Bandar Udara, dan 12 orang ABK/crew off datang di Pelabuhan Laut Celukan bawang. Setelah selesai menjalankan masa karantina di terbitkan surat keterangan sehat dapat melanjutkan perjalanan tetap menjalankan Protokol Kesehatan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia khususnya bidang kesehatan antara berupa penetan kembali rumah sakit rujukan untuk merawat penderita diikuti pemanfaatan berbagai gedung pemerintah untuk upaya karantina dan isolasi penderita, termasuk pemenuhan alat melindungi diri bagi petugas kesehatan yang menangani penyakit tersebut. Pengerahan tenaga untuk memenuhi kebutuhan dalam pengawasan Covid di Pintu Masuk juga dilakukan termasuk usulan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Bandara dan wilayah kerja untuk pengawasan terhadap pelakuk perjalan yang datang dan pergi melalui pelabuhan dan bandara di wilayah Provinsi Bali.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar sesuai tugas dan fungsinya sangat berkepentingan dalam upaya melaksanakan cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit potensial wabah. Terjadinya pandemi Covid-19 di Seluruh dunia, termasuk penularannya ke Indonesia, harus secara intensif dilakukan pengawasan di Pintu masuk (pelabuhan dan bandara), sehingga diharapkan tidak menyebabkan penularan di Wilayah. Guna melaksanakan pengawasan tersebut. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar memiliki empat wilayah kerja (wilker) dan bandara yang meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Wilker Pelabuhan Laut Benoa, Wilker Pelabuhan Laut Padangbai, Wilker Pelabuhan Laut Gilimanuk dan Wilker Pelabuhan Laut Celukan Bawang dengan aktifitas kegiatan 24 jam per hari.

Upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk yang dilaksanakan oleh KKP Kelas I Denpasar, menyesuaikan dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis instansi vertikal di atasnya, yaitu kementerian Kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan adalah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dengan tugas melaksanakan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, berupa pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah dan pintu masuknegara/wilayah. Salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Merujuk pada peraturan tersebut KKP Kelas I Denpasar sebagai salah satu satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan Eselon I Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) telah menetapkan RAK 2020-2024 pada tanggal 31 Januari 2020, dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun

2021 Tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan menjelaskan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KKP Kelas I Denpasar. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Kesehatan menerbitkan Renstra yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Dengan terbitnya Renstra ini, dan berdasarkan hasil revidi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KKP Kelas I Denpasar yang menyebutkan bahwa penentuan Indikator Kinerja dinilai belum memenuhi kriteria Spesific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time bound (SMART) maka KKP Kelas I Denpasar melakukan revisi terhadap RAK 2020-2024 tersebut, khususnya dalam hal penggambaran situasi isu terkini, penyesuaian sasaran, kebijakan, indikator dan target indikator kinerja berdasarkan isu-isu strategis yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun eksternal KKP Kelas I Denpasar.

### **1. Capaian Kinerja**

Secara umum pada tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, 8.526.790 orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah sesuai dengan standar kekarantina kesehatan, 88.121 faktor risiko yang timbul dari pemeriksaan tersebut telah dikendalikan 100%, Indeks pengendalian factor risiko mencapai 102%, Nilai yang diperoleh dari kinerja penganggaran sebesar 87,06, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2021 telah tercapai 97,58, telah diperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 dengan nilai kinerja implementasi WBK satker sebesar 80,74, seluruhnya didukung oleh 107 orang pegawai dimana 72% pegawainya telah meningkat kapasitasnya karena telah mengikuti peningkatan kapasitas ASN minimal 20JPL.

### **2. Sumber Daya**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar hingga bulan Desember 2021 sebanyak 107 orang, dan jumlah tenaga honorer di KKP Kelas I Denpasar sebanyak 49 orang.

Golongan yang paling banyak di KKP Kelas I Denpasar Desember tahun 2021 adalah golongan III yaitu sebanyak 69% (74 orang), sedangkan golongan II sebanyak 14% (14 orang), dan golongan IV yaitu sebanyak 17% (18 orang). Pegawai sudah menduduki Jabatan Fungsional Teknis yaitu sebanyak 78 orang dan beberapa pegawai masih menduduki jabatan Fungsional Pelaksana yaitu sebanyak 27 orang. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 2 orang. Pegawai KKP Kelas I Denpasar menurut tingkat pendidikannya paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 sebesar 38%, S2 sebesar 16%, D3 sebesar 38%, SLTA sebesar 5%, dan SD sebesar 1% dengan jumlah 107 orang.

Inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak dan sarana operasional pendukung lainnya. Barang bergerak yang menjadi inventaris kantor hingga akhir tahun 2021 berupa kendaraan operasional roda 4 sebanyak 16 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit. Barang tidak bergerak yang



dimiliki KKP Kelas I Denpasar yaitu berupa tanah dan bangunan gedung kantor dengan jumlah luas 11.227 m<sup>2</sup>.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Tahun 2021 terdiri dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.094.074.000 dengan total realisasi Rp. 27.049.665.569 (96,28%) yang terdiri dari : Belanja Pegawai Rp. 14.252.297.000 dan realisasinya Rp. 14.113.666.273 (99,03%), Belanja barang Rp.12.180.291.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.2862.584.296 (92,63%) dan Belanja Modal Rp 1.661.386.000 dengan realisasi Rp.1.653.415.000 (99,52%).

## **B. Potensi dan Tantangan**

Dalam upaya deteksi, pencegahan, dan respons untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, potensi dan peluang dalam mengerjakan tugas dan fungsi KKP dilakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi yang merupakan bentuk kerjasama dengan lintas sektor dalam mengantisipasi adanya penyakit potensial wabah. KKP Kelas I Denpasar memiliki 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Penyusunan dokumen rencana kontijensi di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar dilakukan secara bertahap. Sampai pada tahun 2021, penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan di 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Adapun rencana kontijensi di Bandara Int I Gusti Ngurah Rai dilaksanakan pada tahun 2011, penyusunan di Pelabuhan Benoa dilaksanakan pada tahun 2014, penyusunan di pelabuhan Celukanbawang dilaksanakan pada tahun 2018, penyusunan di pelabuhan Padangbai dilakukan pada tahun 2019, dan penyusunan rencana kontijensi di Pelabuhan Gilimanuk dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di pelabuhan Wilker KKP Kelas I Denpasar dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar masih ditemui beberapa permasalahan yaitu :

### **a. Dokumen pemeriksaan kesehatan tidak sesuai standar**

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Orang (Pelaku Perjalanan) yang datang/keluar di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar sering ditemui kendala yaitu dokumen pemeriksaan Kesehatan (*Rapid Test Antigen* atau *PCR*) tidak sesuai standar dan atau dipalsukan. Masih terdapat pelaku perjalanan masuk yang belum mengisi *Health Alert Card* (HAC) di pelabuhan/bandara asal kedatangan sehingga mengakibatkan proses screening di pintu masuk kedatangan mengalami kendala/lambat dan berpotensi terjadinya penumpukan penumpang di lokasi pemeriksaan. Masih terdapat kesalahan pengisian HAC yang dilakukan oleh pelaku perjalanan yang mengakibatkan proses verifikasi HAC berjalan lama dan berpotensi terjadinya penumpukan di lokasi pemeriksaan.

### **b. Deteksi dini penyakit menular langsung TB dan HIV/AIDS**

TB dan HIV/AIDS adalah penyakit menular langsung yang menjadi masalah kesehatan global. Jumlah kasus TB di Indonesia tahun 2020 mencapai 351.936 kasus, dan mayoritas penderita berasal dari usia produktif. Sedangkan kasus HIV/AIDS di

Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019, yaitu sebanyak 50.282 kasus.

Sasaran pada kegiatan ini adalah komunitas di pelabuhan/bandara yang bersifat mobile terutama crew/ABK, sehingga apabila ada ditemukan kasus terduga TB atau hasil RDT HIV/AIDS reaktif, cukup menyulitkan untuk mengontrol pengobatan dan pemeriksaan lanjutannya. Selain itu, masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap HIV/AIDS menjadi hambatan dalam kegiatan ini, yang mengakibatkan tidak semua sasaran bersedia melakukan pemeriksaan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten dalam melakukan deteksi dini penyakit menular langsung TB dan HIV/AIDS, adanya anggaran untuk menunjang pelaksanaan deteksi dini TB dan HIV/AIDS, dukungan dari Dinas Kesehatan setempat untuk penyediaan reagen pemeriksaan, serta adanya bantuan tenaga dan layanan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan TB dan HIV/AIDS dari puskesmas setempat merupakan potensi yang dimiliki KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan deteksi dini penyakit menular langsung.

Adapun upaya yang dilakukan KKP Kelas I Denpasar yaitu berkoordinasi dengan lintas sektor di pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan capaian deteksi dini penyakit menular langsung, dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait rujukan kasus untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan.

### **c. Pelayanan vaksinasi COVID-19**

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Sejak pencaangan vaksinasi COVID-19 pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2021, KKP Kelas I Denpasar telah melakukan pelayanan terhadap 54.250 orang. Sasaran tersebut meliputi SDM kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, ibu hamil, anak usia 12-17 tahun dan anak usia 6-11 tahun.

Pelayanan vaksinasi COVID-19 di KKP Kelas I Denpasar, selain dilaksanakan di Kantor Induk, juga dilaksanakan di 3 wilker pelabuhan laut dan bandara. Namun jadwal pelayanan tidak dapat dilakukan setiap hari, hanya 2-3 kali seminggu karena keterbatasan petugas dan masih harus melaksanakan program rutin yang merupakan tupoksi KKP. Selain itu, sistem Pcare yang digunakan sering mengalami gangguan jaringan sehingga menghambat pelayanan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terkait vaksinasi COVID-19, adanya anggaran untuk menunjang pelayanan mobile vaksinasi COVID-19 dan pengadaan bahan pendukung kegiatan, serta dukungan dari Dinas Kesehatan setempat untuk penyediaan vaksin merupakan potensi yang dimiliki KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu mengoptimalkan petugas dari semua bagian dengan menyusun jadwal kegiatan setiap bulan untuk mendukung pelayanan vaksinasi COVID-19. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan PIC/penanggung jawab Pcare dari BPJS sehingga kendala jaringan

dapat diatasi dengan segera atau mendapatkan solusi yang lain untuk memperlancar proses pelayanan vaksinasi Covid-19.

#### **d. Adanya Revisi DIPA di akhir tahun**

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perencanaan kegiatan membutuhkan banyak penyesuaian dengan kondisi sehingga perlu dilakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanggulangan COVID-19, hal ini mempengaruhi penilaian IKPA dan Nilai Kinerja Anggaran.

#### **e. Peningkatan Kapasitas ASN**

Merujuk pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung.

Pada tahun 2021 pegawai KKP Kelas I Denpasar yang telah mencapai 20 JPL hanya 72% dari jumlah seluruh pegawai. Anggaran yang dialokasikan oleh KKP Kelas I Soekarno- Hatta diperuntukkan untuk berbagai pelatihan teknis dan non teknis. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran, pengembangan potensi tidak hanya melalui diklat namun dapat melalui pelatihan non klasikal lainnya seperti belajar sendiri, bimbingan di tempat kerja, dan lainnya.

Saat ini banyak tersedia webinar, e-learning dengan fleksibilitas waktu dan dapat dilakukan dari jarak jauh atau secara daring, sehingga memudahkan proses pembelajaran. Atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya melalui monitoring dan evaluasi rutin.

#### **f. Pembangunan Zona Integritas**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, diantaranya dengan upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) pada satuan kerja yang merupakan tuntutan perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangan dalam mewujudkan hal ini yaitu paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan kinerja instansi pemerintahan yang dinilai masih belum baik. Sehingga diperlukan peningkatan dan inovasi layanan untuk menjawab hal tersebut.

Pencapaian hasil pre asesment implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu 80,74, dimana masih terdapat kelemahan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya komitmen seluruh pegawai yang berkelanjutan, monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi.

Pada tahun 2024 diharapkan KKP Kelas I Denpasar dapat mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Potensi yang telah dimiliki oleh KKP Kelas I Denpasar yaitu tersedianya berbagai sumber daya, sarana prasarana, dan SDM baik teknis maupun non teknis.

Adapun strategi untuk mencapai WBK/WBBM perlu dilakukan antara lain komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, tim pembangunan

Zona Integritas bertanggung jawab dan menguasai bidangnya, rencana pembangunan zona integritas yang jelas dan terstruktur, perubahan pola pikir dan budaya

kerja, pemanfaatan teknologi informasi, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, monev dan tindak lanjut hasil monev.

Adapun prediksi permasalahan di masa yang akan datang yaitu :

1. Realisasi anggaran yang belum optimal dan belum sesuai dengan RPK dan RPD yang telah disusun.
2. Adanya pandemi penyakit baru yang memaksa adanya perubahan pola hidup baru dan peningkatan kewaspadaan serta pengawasan lalu lintas orang, barang, dan alat angkut.
3. Jumlah tenaga teknis yang ada saat ini masih kurang, terlebih jika kondisi *force majeure* berupa pandemi penyakit masih berlangsung.
4. Besarnya beban kerja dan luasnya area yg diawasi tidak sebanding dengan jumlah SDM di lapangan sehingga pelaksanaan tupoksi KKP belum optimal.
5. Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang belum optimal.
6. Kepemilikan sertifikat Laik Hygiene sanitasi restoran /rumah makan rendah.
7. Audiensi terkait persetujuan pelaksanaan sertifikasi sanitasi pesawat membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak semua maskapai bersedia dengan kegiatan sertifikasi sanitasi pesawat.
8. Masih ditemukannya vektor dan sampah pada gedung atau bangunan di area terminal penumpang.
9. Terlambatnya proses pengumpulan data dari seksi dan bidang ke sub bagian pelaporan.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandar udara. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar (KKP Kelas I Denpasar) merupakan salah satu dari 51 KKP yang ada di Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Bali.

Sesuai dengan kedudukannya, KKP Kelas I Denpasar berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan termasuk diantara tujuh KKP Kelas I.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, KKP Kelas I Denpasar menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;

4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatmuran dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Pelaksanaan tugas KKP Kelas I Denpasar sesuai bentuk organisasi dan tata kerjanya meliputi:

1. Subbagian Administrasi Umum

Tugas yang dilaksanakan oleh Subbagian Administrasi umum adalah melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

a. Kelompok jabatan fungsional teknis, meliputi:

- 1) Jabatan Fungsional Epidemiologi;
- 2) Jabatan Fungsional Sanitarian
- 3) Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan
- 4) Jabatan Fungsional dokter
- 5) Jabatan Fungsional Perawat
- 6) Jabatan Fungsional Panata Laboratorium

b. Kelompok jabatan fungsional administrasi, meliputi

- 1) Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
- 2) Jabatan Fungsional Perencana
- 3) Jabatan Pelaksana

3. Instalasi, yang terdiri dari instalasi Sinkarkes, Rawat Jalan dan Fasmasi.

4. Wilayah kerja dan lokus kegiatan, yang terdiri dari

- a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Benoa, yang terletak di Kota Denpasar Selatan, Bali.
- b. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Padangbai, yang terletak di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali
- c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gilimanuk, yang terletak di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabuapten Jembrana, Bali
- d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Celukan Bawang, yang terletak di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.
- e. Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang terletak di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabuoaten Badung, Bali
- f. Kantor Induk KKP Kelas I Denpasar, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

Tabel 1. Anlisa *Crosscutting* Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan, Altifitas dan Pelaksana KKP Kelas I Denpasar

No	Tugas Pokok	Fungsi	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan	Aktifitas	Pelaksana
1	Melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.	1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 2. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;	Meningkatnya Pelayanan Keekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	1. Meningkatkan upaya Keekarantinaan 2. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi 3. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan 4. Meningkatkan upaya survey vektor dan binatang penular penyakit 5. Meningkatkan koordinasi dengan LS/LP	1. Penguatan upaya keekarantinaan 2. Penguatan surveilans epidemiologi 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan mitra 4. Peningkatan upaya sanitasi dan dampak risiko lingkungan 5. Peningkatan upaya deteksi melalui survey vektor dan BPP	1. <b>Pemeriksaan Orang</b> (Pemeriksaan Pelaku perjalanan, Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina, Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi Malaria, Pemeriksaan Masyarakat di Pelabuhan dan Bandara, Pemeriksaan HIV/AIDS, TBC, ABK dan Pengemudi (Lebaran & Nataru), Penumpang Haji dan Umroh, Pengawasan random Kru Pesawat, Posko (Situasi Khusus), Vaksin Meningitis dan Yellow Fever, Poliklinik, Rapid Test (COVID-19), SKLT, SIADS, Surat Keterangan Pengujian Kesehatan, Vaksinasi COVID-19) 2. <b>Pemeriksaan Alat angkut</b> (Penerbitan dan legalisasi ICV, Penerbitan COP, Penerbitan PHQC, Penerbitan SSC/CS/SCC, Penerbitan P3K 3. <b>Pemeriksaan Barang</b> (Surat ljin Angkut Jenazah, Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif (ONKABA)) 4. <b>Pemeriksaan lingkungan</b> (Survei vektor DTD, Survei vektor lalat, Survei vektor Pes, Survei vektor Malaria, Uji Resistensi Malaria Survei Vektor dan Larvasidasi Miasal Dalam Rangka Arus Mudik Lebaran Dan Nataru, Pemeriksaan TTU, TPW, Air (SAB) Udara (pencemaran)	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
		1. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan; 2. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang keekarantinaan kesehatan; 3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatmuran dan situasi khusus;		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko 2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko 3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko	Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko	Pengendalian terhadap faktor risiko yang timbul dari aktifitas pemeriksaan orang, barang, alat angkut, barang, dan lingkungan	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
		1. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang keekarantinaan kesehatan; 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keekarantinaan kesehatan; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang keekarantinaan kesehatan;	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	1. Kerjasama lintas sector dan program 2. Peningkatan komunikasi dan advokasi 3. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit 4. Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja	Peningkatan gerakan masyarakat dalam rangka pemberantasan vektor dan BPP	Melakukan penyuluhan survey dan pemberantasan vektor dan BPP kepada masyarakat	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, dan Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan	
2	1. Penusunan rencana, kegiatan dan anggaran; 2. Pelaksanaan urusan administrasi KKP. 3. Pengelolaan data dan informasi di bidang keekarantinaan kesehatan;	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	1. Meningkatkan realisasi output dan anggaran 2. Pemanfaatan sisa anggaran yang sudah tercapai volume outputnya	Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel	Monitoring pelaksanaan anggaran	Substansi Tata Usaha	
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan 2. Melakukan revisi DIPA secara selektif. 3. Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan 4. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA. 5. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin. 6. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maksimal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak). 7. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPW-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP. 8. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. 9. Menghindari adanya dispensasi SPM. 10. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D. 11. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran. 12. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPW-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan) 13. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM. 14. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPW untuk menghindari kesalahan/ pengembalian SPW oleh sistem di KPPN	Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel	1. Menyusun dokumen perencanaan 2. Menyusun Rencana Penarikan dan Pencairan dana 3. Membuat dokumen pencairan anggaran (SPM, SPP) 4. Membuat dan rekam LPJ Bendahara 5. Mengajukan Uang Persediaan dan Rupiah Murni dan PNPB 6. Menyusun revisi halaman III DIPA 7. Menyusun revisi DIPA 8. Pengajuan tagihan 9. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran bulanan 10. Melaksanakan monitoring kinerja anggaran	Substansi Tata Usaha	
			Kinerja implementasi WBK satker	1. Membangun Zona Integritas menuju WBK dan BBM 2. Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan Tim Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	1. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM 2. Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil dan komponen pengungkit yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang dihindarkan, serta Kualitas Pelayanan Publik/tendorong petugas KKP untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, seminar baik daring maupun luring	Seluruh Substansi KKP Kelas I Denpasar	
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mengikuti peningkatan kapasitas baik secara daring maupun luring	Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia	Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara luring maupun daring	Substansi Tata Usaha	

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. **Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
2. **Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
3. **Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
4. **Peningkatan Sumber Data Manusia.**

## **B. Tujuan Strategis**

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP Kelas I Denpasar telah menetapkan tujuan strategis yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024**



### C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni “Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024”. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

### D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan menyesuaikan Revisi Renstra yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Selain itu sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

**Tabel 2. Indikator Kinerja KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024**

<b>Indikator Tahun 2020-2024 (semula)</b>	<b>Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)</b>
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2022-2024, KKP telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara  
Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.  
Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara  
Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.
4. Nilai kinerja anggaran  
Definisi operasional indikator ini yaitu nilai kinerja anggaran yang telah terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA. Hal ini merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu Penyusunan RKAKL, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana, Revisi halaman 3 DIPA, Monitoring rutin realisasi fisik dan anggaran, Penyusunan laporan monev DJA. Target yang ditetapkan yaitu 88 pada tahun 2024.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran  
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Target yang ditetapkan yaitu 95 pada tahun 2024.
6. Kinerja implementasi WBK satker  
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Target yang ditetapkan yaitu 81 pada tahun 2024.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya  
Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun. Target yang ditetapkan yaitu 82% pada tahun 2024.

#### **E. Arah Kebijakan dan Strategi**

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Memperkuat Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi.

Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

Untuk mencapai indikator indeks deteksi dini faktor risiko penyakit dilakukan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya Kekarantinaan

- b. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi
- c. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan
- d. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
- e. Meningkatkan upaya survey vektor dan binatang penular penyakit
  - Menjaga kualitas petugas pengawas dan dan pelaksana teknis
  - Menjaga kualitas dan teknik survey yang paling efektif
  - Meningkatkan dan menjaga kualitas peralatan
  - Meningkatkan kualitas logistik survei
  - Perencanaan penganggaran yang sesuai dengan kondisi lapangan

Untuk mencapai Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan strategi sebagai berikut:

- a. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
- b. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
- c. Kerjasama lintas sektor dan program
- d. Peningkatan komunikasi dan advokasi
- e. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja

Untuk mencapai indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan strategi sebagai berikut:

- a. Kerjasama lintas sektor dan program
- b. Peningkatan komunikasi dan advokasi
- c. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit
- d. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja

Untuk mencapai indikator Nilai kinerja anggaran dilakukan strategi yaitu Meningkatkan realisasi output dan anggaran dan Pemanfaatan sisa anggaran yang sudah tercapai volume outputnya

Untuk mencapai indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
- b. Melakukan revisi DIPA secara selektif.
- c. Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan
- d. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA.
- e. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- f. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maximal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).
- g. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP.
- h. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.

- i. Menghindari adanya dispensasi SPM.
- j. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.
- k. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.
- l. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)
- m. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.
- n. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN

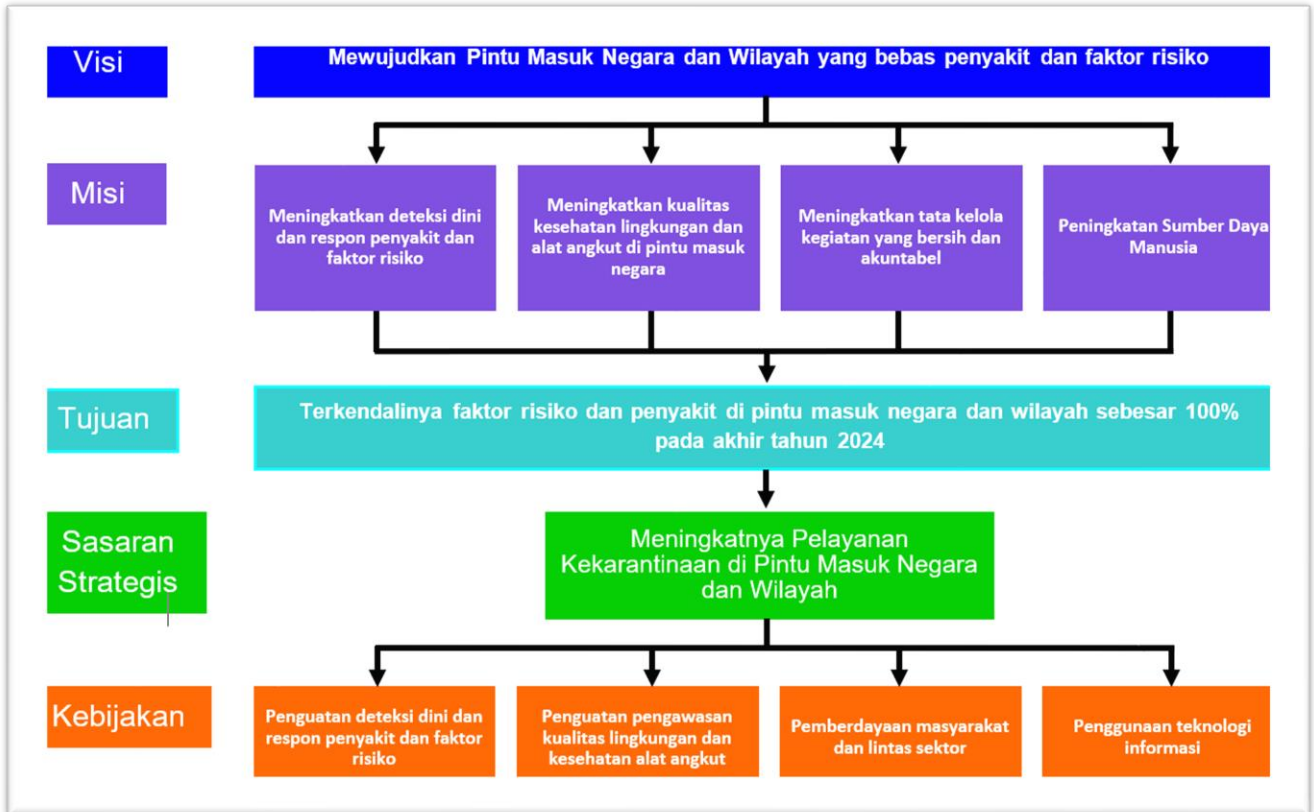
Untuk mencapai indikator Kinerja implementasi WBK satker dilakukan strategi yaitu Membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dan Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan strategi yaitu Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mengikuti peningkatan kapasitas baik secara daring maupun luring.

### BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

#### A. Kerangka Logis

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi dibutuhkan suatu kerangka logis yang terorganisir sehingga dapat menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan tanggung jawab. Adapun kerangka logis kinerja KKP Kelas I Denpasar sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan KKP Kelas I Denpasar**

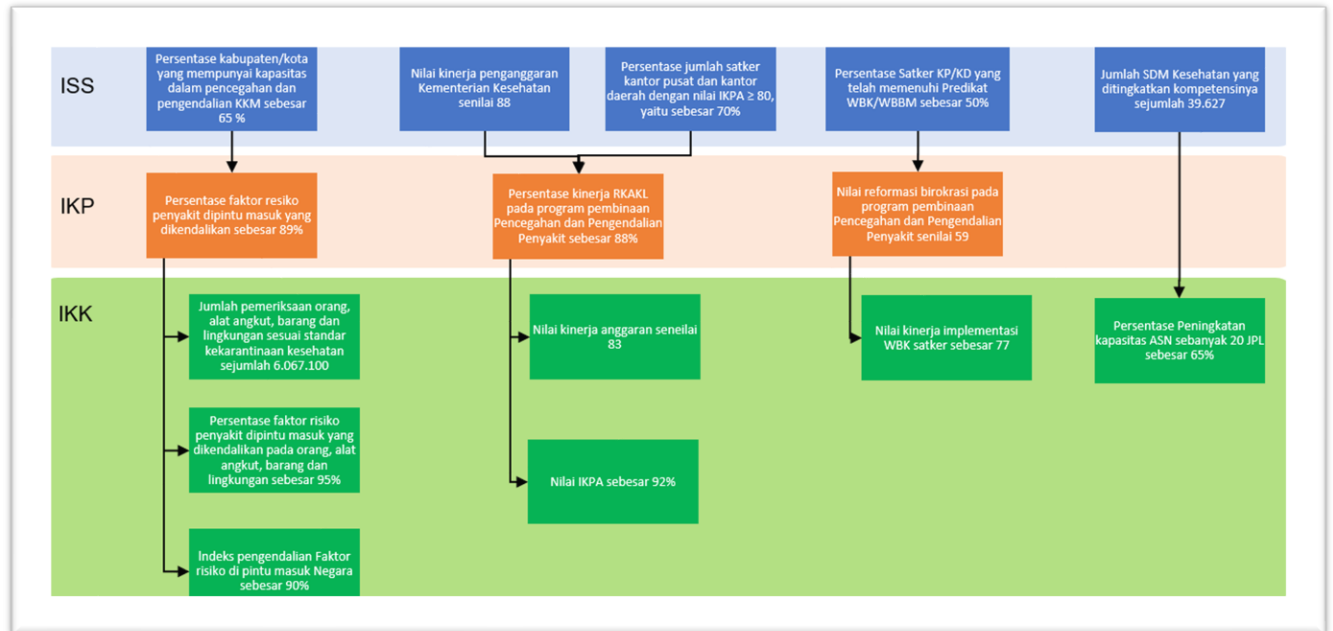
Visi KKP Kelas I Denpasar adalah Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah bebas Penyakit dan Faktor Risiko sesuai dengan Rencana Aksi Program Ditjen P2P 2020-2024. Untuk melaksanakan visi tersebut, KKP Kelas I Denpasar menetapkan misi tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara; meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel; dan Peningkatan Sumber Data Manusia.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP Kelas I Denpasar telah menetapkan tujuan strategis yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatkan Pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100%

pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Adapun penjabaran *casecading* Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas I Denpasar sebagai berikut:



**Gambar 2. Cascading Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas I Denpasar**

Diagram di atas menggambarkan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level Indikator Sasaran Strategis tingkat Kementerian Kesehatan, berlanjut ke level Indikator Kinerja Program tingkat Eselon I Ditjen P2P, selanjutnya di level Indikator Kinerja Kegiatan tingkat Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja KKP Kelas I Denpasar.

## B. Rencana Kegiatan

Perubahan indikator mulai tahun 2022 -2024 berpengaruh pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun target kinerja KKP Kelas I Denpasar 2022-2024 sebagai berikut:

**Tabel 3. Target Kinerja KKP Kelas I Denpasar tahun 2022-2024**

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
<b>Meningkatnya Meningkatkan Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah</b>				
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0.88	0.89	0.90
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	98%	99%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0.85	0.86	0.87
<b>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>				
4	Nilai kinerja anggaran	85	86	88
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	94	95
6	Kinerja implementasi WBK satker	78	79	81
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	81%	82%

1. Untuk Mencapai Target Indikator Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Deteksi Faktor risiko Orang yang diperiksa sesuai standar
    - Pengawasan pelaku perjalanan  
 Kegiatan pemeriksaan orang pada indikator ini meliputi kegiatan pemeriksaan orang dari Negara terjangkau penyakit menular potensial KLB di Luar Negeri dengan metode pemeriksaan suhu tubuh, tanda dan gejala penyakit dan pemberian Health Alert Card. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan pintu masuk Bali paling potensial untuk wisatawan asing dari Luar Negeri. Tingginya mobilitas alat angkut, orang dan barang di Bandara Int. I Gusti Ngurah Rai berbanding lurus dengan tingginya pula risiko penularan penyakit potensial KLB/wabah ke wilayah Bali yang bersumber dari luar negeri. Sasaran kegiatan ini ialah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang atau crew yang tiba/berangkat di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar. Penafisan diutamakan untuk pelaku perjalanan yang tiba dari Negara terjangkau atau wilayah terjangkau di dalam negeri (Domestik) dan luar negeri (Internasional). Sementara akumulasi pelaku perjalanan yang datang maupun keluar yang ditapis di pintu masuk pada tahun 2021 sebanyak 8.154.324 orang, yang terdiri dari



4.012.987 orang pelaku perjalanan yang datang, berikutnya 4.124.660 orang pelaku perjalanan yang berangkat. Pengawasan terhadap pelaku perjalanan diantaranya pengawasan vaksinasi dan ICV jemaah haji, pengawasan status vaksinasi dan ICV jemaah umroh, pengawasan/pemeriksaan lainnya terhadap pelaku perjalanan yang melalui pelabuhan laut dan bandara. KKP Kelas I Denpasar memberikan pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV bagi pelaku perjalanan yang meliputi vaksinasi yellow fever dan meningitis meningokokus. Pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV dapat dilakukan di IRJ Kantor Induk dan Wilker Pelabuhan Laut Celukanbawang.

- Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina  
Sasaran kegiatan ini ialah Pelaku Perjalanan Internasional yang terdiri dari penumpang, ABK / Crew (WNI dan WNA) sign of yang datang di pintu masuk wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar wajib menjalankan karantina di hotel karantina, pada tahun 2021 sebanyak 348 orang Pelaku Perjalanan Internasional di Hotel Karantina /Lokasi Karantina.
- Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi malaria  
Sasaran kegiatan ini ialah pelaku perjalanan yang terdiri dari penumpang atau crew yang datang di pintu masuk wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar. Pemeriksaan diutamakan untuk pelaku perjalanan yang datang dari endemis tinggi, pada tahun 2021 sebanyak 324 orang yang kegiatan pemeriksaan kegiatan Surveilans Migrasi Malaria
- Pengawasan haji  
Pengawasan haji berupa pengawasan pelaksanaan vaksinasi meningitis yang dilakukan ke masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain pengawasan vaksinasi meningitis dilakukan pula pengesahan/legalisasi Icv pada kartu kesehatan jemaah haji.
- Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat/Komunitas Bandara/Pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar  
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat/komunitas bandara/pelabuhan yang dilakukan dalam upaya penemuan kasus secara aktif. Adapun jumlah Masyarakat/komunitas bandara/pelabuhan yang diawasi di wilayah kerja selama di tahun 2021 sebanyak 825 orang. Dari jumlah masyarakat yang diawasi tidak ditemukan adanya masyarakat yang memiliki tanda atau gejala penyakit menular potensial wabah.
- Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS  
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS serta TB dilakukan di empat wilker pelabuhan laut dengan sasaran adalah komunitas di pelabuhan yang meliputi ABK dan pegawai pelabuhan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS melalui kegiatan mobile VCT telah dilaksanakan dari tahun 2016. Capaian kegiatan tahun 2016 sebanyak 520 orang, tahun 2017 sebanyak 1.302, tahun 2018 sebanyak 500 orang,

dan tahun 2019 sebanyak 500 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.

- Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP  
Kegiatan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja pelabuhan laut dan bandara dilaksanakan pada tahun 2018 dengan sistem ketok pintu (door to door) dengan jumlah sasaran sebanyak 1.250 orang dan pada tahun 2019 sasaran mencapai 600 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.
- Pengawasan ABK dan pengemudi saat posko lebaran dan nataru  
Saat hari raya Lebaran dan Nataru biasanya terjadi peningkatan arus mudik yang berdampak pada peningkatan lalu lintas orang melalui pelabuhan dan bandara. Hal ini berpotensi untuk terjadinya kegawatdaruratan medis apabila tidak didukung dengan kondisi tubuh yang sehat. Sebagai upaya pencegahan, petugas KKP Kelas I Denpasar melakukan pemeriksaan bagi crew pesawat, ABK, dan pengemudi secara random berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol.
- Pengawasan pemeriksaan crew pesawat  
Kegiatan pemeriksaan/screening kesehatan berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol sudah dilakukan secara rutin oleh masing-masing airlines terhadap awak pesawat udara yang akan berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam rangka melaksanakan fungsi yang diamanatkan, KKP Kelas I Denpasar melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan tersebut.
- Layanan kesehatan pada Situasi Khusus  
Pada saat situasi khusus seperti arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Maulid, Piodalan Pura Silayukti Padangbai diselenggarakan posko pelayanan kesehatan oleh KKP Kelas I Denpasar yang ditujukan bagi penumpang/pengguna jasa atau masyarakat yang terlibat pada acara tersebut.
- Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut dan bandara (pelayanan bukan penumpang)  
Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut, bandara dan kantor induk yang melayani komunitas dan pengguna jasa pelabuhan /bandara.
- Pelayanan pengujian kesehatan bagi komunitas pelabuhan dan bandara  
Pelayanan pengujian kesehatan ditujukan bagi komunitas pelabuhan dan bandara untuk keperluan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, atau pengurusan ijin tertentu.
- Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV  
Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV dilaksanakan di Kantor Induk dan Wilker Pelabuhan Celukan Bawang.

b. Deteksi Faktor risiko Alat Angkut yang diperiksa sesuai standar

- Pemeriksaan Gendec

Pemeriksaan Health Part of General Declaration (Gendec) merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/crew berpenyakit menular. Pemeriksaan dilakukan dengan cara boarding ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau dengan mengamati Gendec yang didapat dari Groundhandling.

- Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (COP)

Sasaran kegiatan ini ialah setiap kapal yang datang dari luar negeri atau datang dari pelabuhan wilayah terjangkau di dalam negeri; atau mengambil orang dan/atau barang dari kapal yang datang dari luar negeri dan/atau pelabuhan wilayah terjangkau di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, kapal yang sebagaimana disebutkan diatas tersebut berada dalam status karantina. Setiap kapal yang berada dalam status karantina, hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang setelah dilakukan pengawasan kekejarantinaan kesehatan. Pengawasan kekejarantinaan kesehatan dilakukan untuk memperoleh persetujuan kekejarantinaan kesehatan. Dokumen persetujuan kekejarantinaan kesehatan berupa Certificate of Pratique (COP). Akibat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2021, hampir seluruh negara di dunia menjadi negara terjangkau, begitu pula dengan wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah penerbitan COP pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerbitan COP pada tahun ini ialah 1.170 dokumen.

- Pemeriksaan Kesehatan Kapal

Kegiatan ini bertujuan mencegah masuk/keluarnya penyakit-penyakit potensial KKM melalui kapal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri dengan sasarannya seluruh awak kapal, penumpang, barang, dan muatan lainnya serta keadaan sanitasi dan perlengkapan P3K yang dimiliki. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik melalui pengamatan visual dan dokumen kesehatan kapal yang masuk maupun keluar ke/dari pelabuhan.

- Penerbitan Buku Kesehatan

Buku kesehatan wajib dimiliki oleh kapal yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia yang berisi tentang status kesehatan pelabuhan asal, status kesehatan kapal, informasi berikutnya dokumen kesehatan kapal sesuai undang-undang yang berlaku dan saran perbaikan atau yang dianjurkan oleh petugas kesehatan di pelabuhan asal. Buku kesehatan tersebut merupakan sarana komunikasi petugas teknis kesehatan pelabuhan antar pelabuhan di Indonesia sebagai bentuk kewaspadaan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular potensial PHEIC melalui kapal, penumpang, dan barang yang diangkut. Semua kapal yang

melaksanakan pelayaran di dalam negeri wajib memiliki buku kesehatan kapal. Dengan demikian, penerbitan buku kesehatan dilakukan apabila kapal berbendera akan melakukan pelayaran di perairan Indonesia atau untuk mengganti buku kesehatan lama yang sudah penuh terisi bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri.

- Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Ship Sanitation Control Exemption Certificate/ Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)

Kegiatan ini merupakan kegiatan penerbitan dokumen sanitasi setelah dilaksanakannya pemeriksaan sanitasi dan faktor risiko kesehatan pada kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Dokumen Sanitasi Kapal, dokumen sanitasi kapal terdiri atas SSCEC dan SSCC. SSCEC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan dinyatakan bebas dari tindakan sanitasi, sedangkan SSCC diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi berdasarkan rekomendasi pemeriksaan sanitasi. Jumlah penerbitan SSCEC/SSCC tahun 2021 adalah sebesar 1.095 dokumen yang terdiri dari 1.093 dokumen SSCEC dan 2 dokumen SSCC. Terdapat penerbitan SSCC sebanyak 2 dokumen di wilker Pelabuhan Benoa karena pada saat pemeriksaan sanitasi terdapat faktor risiko kesehatan yang ditemukan yaitu ditemukan kecoa/serangga penular penyakit sebanyak 1 kapal, dan ditemukan tikus sebanyak 1 kapal. Telah dilakukan tindakan sanitasi berupa tindakan hapus serangga dan hapus tikus.

- Kegiatan Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat angkut (kapal), orang dan barang yang berangkat di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar dalam kondisi sehat dan bebas faktor risiko sehingga dapat diterbitkan dokumen PHQC. Jumlah penerbitan PHQC di tahun 2021 ialah sebesar 96.679 dokumen terdiri dari: 88.317 dokumen berangkat di dalam negeri, dan 75 dokumen berangkat di luar negeri terjangkau.

- Pengawasan kelengkapan obat P3K

Pengawasan kelengkapan obat P3K kapal dilakukan di 4 wilayah kerja pelabuhan laut KKP Kelas I Denpasar yaitu Benoa, Padangbai, Gilimanuk, dan Celukanbawang. Hal ini bertujuan sebagai upayaantisipasi dan pertolongan pertama kejadian kegawatdaruratan yang dapat terjadi selama kapal berlayar. Jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 3.097 kapal, sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 2.800 kapal (capaian 110,6%).

c. Deteksi Faktor risiko Barang yang diperiksa sesuai standar

- Kegiatan Penerbitan Surat Ijin Lalu Lintas Jenazah (SIAJ)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan lalu lintas barang yang berupa pengiriman jenazah/abu jenazah/kerangka lintas wilayah. Kegiatan yang dilakukan ialah pemeriksaan/verifikasi kelengkapan

dokumen persyaratan dan kemudian dilakukan penerbitan surat ijin angkut jenazah.

– Penerbitan Sertifikat OMKABA

Pengawasan lalu lintas OMKABA dilakukan terhadap muatan (cargo) dan barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Pengawasan ini bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara Denpasar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Sertifikat OMKABA diterbitkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen. Surat izin yang diterbitkan merupakan salah satu rekomendasi bagi bea cukai untuk memutuskan barang tersebut diizinkan masuk ke Indonesia atau tidak. Semua OMKABA yang masuk untuk keperluan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Barang OMKABA yang dianggap tidak memiliki faktor risiko kesehatan maka akan diterbitkan Health sertifikat ekspor /Surat Keterangan OMKABA Impor.

d. Deteksi Faktor risiko Lingkungan yang diperiksa sesuai standar

– Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

– Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan hygiene bahan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.

– Pemeriksaan sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)

Pemeriksaan sanitasi SAB dilakukan untuk memastikan bahwa air bersih yang dipakai memenuhi persyaratan kesehatan secara fisika, kimia dan biologi. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan sanitasi sarana dan sisa clor pH, pemeriksaan sampel air secara biologis dan pemeriksaan sampel air secara kimia.

– Survei Vektor DBD

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan Metode Single Larva Survey di semua wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar yaitu di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Laut Benoa, Pelabuhan Laut Padangbai, Pelabuhan Laut Celukanbawang, dan Pelabuhan Laut Gilimanuk. Hasil survey jentik akan menggambarkan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti setiap bulan di daerah perimeter dan buffer dengan angka House Index (HI), Container Index (CI) dan Breteau Index (BI). Target kegiatan layanan ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 420 layanan.

– Survei Vektor Diare

Layanan survei vektor diare dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Survei kepadatan lalat. Pengamatan kepadatan lalat dilakukan dengan menggunakan flygrill yang didasarkan pada sifat lalat yang cenderung untuk hinggap pada tepi-tepi atau tempat yang bersudut dalam kurun waktu tertentu. Flygrill diletakkan di tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat sampah, kotoran hewan, kandang, dan lainnya.
  - b. Survei kepadatan kecoa. Pengamatan kepadatan kecoa dilakukan dengan menggunakan perangkap / lem kecoa yang dipasang dalam satu malam di sekitar lokasi yang terdapat jejak keberadaan kecoa (terdapat kotoran dan kapsul telur kecoa, terdapat kecoa dewasa (mati/hidup)) di alat angkut, tempat-tempat umum, perkantoran, warung makan dan lain-lain di wilayah kerja.
- Survei Vektor Pes
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target output ini adalah sebagai berikut :
- a. Pemetaan  
Kegiatan pemetaan dilakukan dengan menentukan titik-titik pada lokasi bangunan di area pelabuhan dan bandara yang menjadi tempat persembunyian dan perkembangbiakan tikus menggunakan GPS. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari oleh 2 orang petugas.
  - b. Pemasangan perangkap tikus  
Kegiatan yang dilakukan dalam surveilans binatang pembawa penyakit adalah pemasangan perangkap tikus. Target pemasangan perangkap adalah sebanyak 45 layanan per tahun di seluruh wilker.
  - c. Identifikasi tikus dan pinjal  
Setelah dilakukan pemasangan perangkap tikus, langkah kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah identifikasi tikus dan pinjal sebagai berikut:
    - Jumlah tikus yang tertangkap dihitung kemudian diidentifikasi untuk mengetahui jenis tikus yang tertangkap.
    - Melakukan penyisiran tikus untuk mendapatkan pinjal
    - Jumlah pinjal dihitung kemudian diidentifikasi untuk mengetahui jenis pinjal yang didapat.
- Survei Vektor Malaria
- a. Survei Jentik  
Kegiatan ini hanya dilaksanakan di 3 wilker yang memiliki *breeding places* nyamuk *Anopheles*, yaitu di Bandara Ngurah Rai, wilker Padangbai dan Wilker Celukanbawang. Dari ketiga wilker tersebut, hanya Wilker Celukanbawang yang memiliki perindukan yang berada di wilayah perimeter. Target kegiatan sebanyak survei jentik *Anopheles* adalah sebanyak 15 layanan per tahun.

b. Survei nyamuk

Target kegiatan ini adalah sebanyak 15 layanan di wilker Padangbai, Celukanbawang, dan Bandara. Selama tahun 2021, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target sebanyak 15 layanan atau capaian sebanyak 100%.

c. Uji Resistensi Insektisida

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui daya bunuh insektisida yang digunakan pada kegiatan pengendalian nyamuk, kemudian dilanjutkan dengan uji tingkat kerentanan nyamuk di wilayah kerja Gilimanuk terhadap insektisida yang digunakan. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam uji adalah sebagai berikut:

- Pemasangan ovitrap untuk mendapatkan telur nyamuk dari lapangan.
- *Rearing* telur nyamuk hingga menjadi nyamuk dewasa yang akan digunakan sebagai sampel dalam bio assay dan *susceptibility test*. Kegiatan dilaksanakan oleh petugas wilker Gilimanuk.

2. Untuk Mencapai Target Indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang. Kegiatan pengendalian faktor risiko selama tahun 2021 dilaksanakan di seluruh di pintu masuk Provinsi Bali baik Bandara maupun Pelabuhan Laut terdiri dari :

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan ICV yang tidak valid
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan suhu penumpang lebih dari 38 oC
- Tindak lanjut hasil screening HIV dengan hasil positif  
Tindak lanjut kepada responden dengan hasil reaktif dilakukan konseling dan dirujuk untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk penanganan kasus ini berkoordinasi dengan puskesmas, yayasan kerti praja dan pokja penanggulangan HIV/AIDS.
- Tindak lanjut hasil screening TB dengan hasil positif  
Tindak lanjut penanganan kasus dengan terduga TB yaitu berkoordinasi dengan puskesmas terdekat untuk pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan dahak) dan pengobatan lebih lanjut.
- Penanganan ABK/crew dan Pengemudi yang sakit atau dengan FR penyakit
- Penanganan pelayanan rujukan  
Pelayanan rujukan ditujukan bagi pasien yang mengalami kegawatdaruratan medis dan memerlukan penanganan serta pengobatan lebih lanjut secara cepat dan tepat. Di setiap wilker pelabuhan laut dan bandara telah disediakan fasilitas ambulans untuk mendukung pelayanan rujukan ini. KKP juga telah melakukan koordinasi dan jejaring kerja untuk

- mendukung upaya rujukan karena pelayanan kesehatan yang tersedia di KKP hanya terbatas
      - Penanganan kejadian gawat darurat
        - Penanganan kejadian kasus gawat darurat medis ditujukan bagi komunitas pelabuhan/bandara yang mengalami masalah kesehatan dan memerlukan penanganan segera.
      - Penanganan hasil rapid tes Covid-19 Positif
        - Pengawasan dan skrining covid -19 dilakukan terhadap karyawan KKP Kelas I Denpasar, komunitas pelabuhan/bandara, serta pengguna jasa pelabuhan dan bandara. Terhadap hasil skrining RDT reaktif maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut berupa pemeriksaan PCR, pemberian KIE terkait protokol kesehatan, tracing kontak, koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk isolasi.
    - b. Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut.
      - Kegiatan yang dilakukan berupa tindakan penyehatan kapal baik berupa deratisasi, desinseksi maupun desinfeksi sebanyak 2 dokumen SSCC diterbitkan di Pelabuhan Laut Benoa. Kegiatan penerbitan SSCC di tiap Wilker KKP Kelas I Denpasar adalah semua kapal yang masa berlaku SSCC telah habis atau saat dilakukan pemeriksaan kesehatan kapal dinyatakan tidak sehat, atau dinyatakan terjangkit penyakit yang dapat menimbulkan wabah/PHEIC. Kegiatan pengawasan dengan hasil pemeriksaan ditemukan indikasi penularan penyakit untuk terjadi penularan penyakit seperti ditemukannya tikus dan serangga penular penyakit (vektor) atau ditetapkan sebagai kapal terjangkit penyakit menular potensial PHEIC, maka terlebih dahulu harus dilakukan tindakan penyehatan dan kemudian diberikan dokumen SSCC.
    - c. Persentase Faktor risiko yang dikendalikan pada barang
      - Tindak lanjut terhadap barang yang tidak memenuhi syarat
    - d. Persentase Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan sebagai berikut :
      - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor DBD
      - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor lalat dan kecoa
      - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Pes
      - Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Malaria
      - Tindak lanjut terhadap kegiatan Uji Resistensi Malaria
3. Untuk Mencapai Target Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kelengkapan Data Surveilans
    - Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Pelabuhan dan Bandara dilakukan dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari klinik KKP dan Puskesmas terdekat yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Data surveilans dirangkum ke dalam laporan kekarantinaan kesehatan dan surveilans epidemiologi yang disusun setiap bulannya sejumlah 12 laporan per tahun.
  - b. Jumlah SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam Sistem



Adapun kegiatan yang dilakukan untuk merespon SKD KLB tersebut ialah :

1) Kegiatan Verifikasi Rumor

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan kejadian penyakit menular berpotensi KLB yang diterima di wilayah kerja. Hasil verifikasi terhadap rumor tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yaitu jika hasil verifikasi menyatakan bahwa memang terjadi kasus penyakit menular berpotensi KLB/wabah maka akan dilakukan investigasi/ penyelidikan epidemiologi. Dilihat di tahun 2021 terdapat 2 rumor SKD KLB yang ditindaklanjuti dengan verifikasi rumor.

2) Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penularan penyakit baru di wilayah kerja sebagai dasar untuk menyatakan tempat sumber penularan penyakit. Hasil investigasi kemudian dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai tindakan pengendalian. Penyelidikan epidemiologi di tahun 2021 sebanyak 43 kali yang seluruhnya merupakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terkait kasus COVID-19. Telah dilaksanakan kegiatan PE COVID-19 di Bandara I Gst Ngurah Rai sebanyak 15 kali, berikutnya di Pelabuhan Laut Celukanbawang sebanyak 11 kali, diikuti 2 kegiatan di kantor induk dan 5 kali di masing-masing di Pelabuhan Laut Benoa, di Pelabuhan Laut Padangbai, di Pelabuhan Laut Gilimanuk

c. Penyusunan Rencana Kontijensi

KKP Kelas I Denpasar memiliki 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Penyusunan dokumen rencana kontijensi di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar dilakukan secara bertahap. Sampai pada tahun 2021, penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan di 4 wilayah kerja pelabuhan dan 1 wilayah Bandara. Adapun rencana kontijensi di Bandara Int I Gusti Ngurah Rai dilaksanakan pada tahun 2011, penyusunan di Pelabuhan Benoa dilaksanakan pada tahun 2014, penyusunan di pelabuhan Celukanbawang dilaksanakan pada tahun 2018, penyusunan di pelabuhan Padangbai dilakukan pada tahun 2019, dan penyusunan rencana kontijensi di Pelabuhan Gilimanuk dilaksanakan pada tahun 2021. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah dituangkan dalam dokumen Rencana Kontijensi. Tujuan dari dibuatnya Rencana Kontijensi ini adalah terwujudnya kesepakatan dari berbagai pihak terkait di lingkungan Bandara Denpasar dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC)

d. Indeks Pinjal  $\leq 1$

Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas

dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

e. Hi Perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi *Aedes sp* baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

f. Hi buffer <1%

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan Permenkes 431 tahun, wilayah buffer harus  $Hi < 1\%$  dan populasi nyamuk *Aedes sp* baik stadium larva maupun dewasa ditekan serendah mungkin. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva

g. Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Pengamatan keberadaan larva *Anopheles* dilakukan dengan survei Larva *Anopheles* dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar bandara yaitu tidak ditemukannya larva *Anopheles*.

h. Kepadatan Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

i. Kepadatan kecoa < 2

kecoa juga merupakan vektor yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi kecoa adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan kecoanya. Kepadatan kecoa < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

j. TTU Memenuhi Syarat

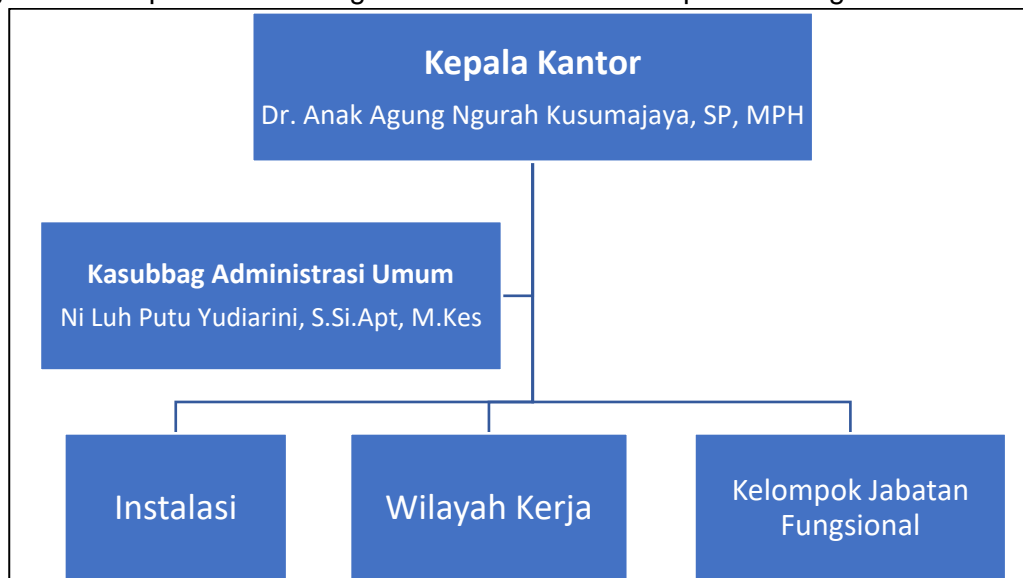
Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di Pelabuhan dan Bandara di lingkungan KKP Kelas I Denpasar dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

- k. TPM Laik Hygiene  
Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPM terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).
  - l. Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan  
Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan seluruh bandara, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan pesawat (water car dan catering/jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (drinking water).
4. Untuk mencapai Indikator Nilai kinerja anggaran dilakukan kegiatan sebagai berikut: Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu Penyusunan RKAKL, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana, Revisi halaman 3 DIPA, Monitoring rutin realisasi fisik dan anggaran, Penyusunan laporan monev DJA. Target yang ditetapkan yaitu 88 pada tahun 2024.
  5. Untuk mencapai indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.  
Definisi operasional indikator ini yaitu Nilai IKPA yang telah terhitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OM SPAN. IKPA adalah suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
  6. Untuk mencapai indikator Kinerja implementasi WBK satker dilakukan kegiatan sebagai berikut:
    - a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar
    - b. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
    - c. Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen pengungkit Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- d. Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti, serta Kualitas Pelayanan Publik
7. Untuk mencapai indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diperoleh dari :
- a. Pendidikan yaitu tugas Belajar dan izin Belajar
  - b. Pelatihan Klasikal yaitu tatap muka di kelas yaitu Pelatihan Sktruktural/Diklat PIM, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, Seminar/Konferensi, Workshop/Lokakarya, Kursus, Penataran, Bimbingan Teknis, Sosialisasi
  - c. Pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas seperti Coaching, Mentoring, E-learning, Pelatihan Jarak Jauh, Datasering, Pembelajaran Alam Terbka (Outbond), Patok Banding, Pertukaran PNS dengan pegawai swasta, Belajar mandiri, Komunitas Belajar, Bimbingan di tempat kerja, dan Magang/praktik kerja.

**C. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas I Denpasar dipimpin oleh kepala dan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional. Adapun Struktur Organisasi KKP Kelas I Denpasar sebagai berikut:



**Gambar 3. Struktur Organisasi KKP Kelas I Denpasar tahun 2022**

**D. Kerangka Regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang

menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan
2. Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
8. Permenkes No. 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit
9. Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
10. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
11. Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan
12. Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan
14. Kepmekes Nomor 293/menkes/SK/IV/2009 28 April 2009 Tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
16. Kepmenkes No 1098/Menkes/SK/VII/ 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
17. International Health Regulation 2005

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas I Denpasar beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain aturan rujukan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP berkaitan dengan berlakunya UU No 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

## E. Kerangka Pendanaan

Pencapaian target indikator kinerja KKP Kelas I Denpasar membutuhkan sumber daya berupa sarana dan prasarana serta pendanaan. Adapun kerangka pendanaan per indikator kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2022-2024**

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2022	2023	2024	
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	6.988.969	1.718.432	1.890.276	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1.188.914	1.269.966	1.396.963	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	81.100	164.346	180.780	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Substansi Upaya Kesehatan Lintas 4Wilayah, S5substansi Pe6ngendalian Risiko Lingkungan
4	Nilai kinerja anggaran	19.678.761	21.646.637	23.811.301	Substansi Tata Usaha
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92.711	101.982	112.180	Substansi Tata Usaha
6	Kinerja implementasi WBK satker	16.240	17.864	19.650	Seluruh Substansi KKP Kelas I Denpasar
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	47.379	52.117	57.329	Seluruh Substansi KKP Kelas I Denpasar

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan setiap triwulan dan didukung pula dengan evaluasi tiap semester dengan menggunakan matrik pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi e performance Kementerian Kesehatan. Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-Monev DJA, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas.

#### **B. Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi program KKP Kelas I Denpasar dilakukan setiap awal bulan dan setiap triwulan dengan melibatkan Kepala KKP Kelas I Denpasar didukung oleh Koordinator, Sub Koordinator, dan Pejabat Fungsional. Evaluasi pelaksanaan pengawasan di Bandara dan Pelabuhan juga melibatkan Dinas Kesehatan, Otoritas Bandara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Airlines, Agen Kapal serta Lintas Sektor Lintas Program terkait Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di KKP Kelas I Denpasar dilaksanakan setiap awal bulan dengan melaksanakan rapat internal monitoring evaluasi kinerja dan dituangkan ke dalam laporan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dilaksanakan setiap ditemukan permasalahan dan diinventaris per triwulan. Laporan evaluasi tersebut akan dirangkum menjadi satu laporan yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas I Denpasar pada akhir tahun.

#### **C. Pengendalian**

Pengendalian internal yang dilakukan KKP Kelas I Denpasar berupa kegiatan pemantauan kegiatan secara terus menerus dari pimpinan dan pegawai untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan. Pengendalian internal yang dilakukan melalui :

- a. Rencana Aksi Kegiatan yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
- b. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/RKAKL.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundangan
- d. Pengendalian terhadap permasalahan yang timbul sesuai dengan jenis kegiatan

Pelaksanaan pengendalian dilakukan setiap ditemukan adanya permasalahan yang dilaporkan setiap bulan dalam rapat monitoring bulanan yang dipimpin oleh Kepala KKP Kelas I Denpasar. Tindak lanjut dan bukti tindak lanjut dilaporkan pada rapat monitoring kinerja bulan berikutnya.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas I Denpasar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang dan Bagian KKP Kelas I Denpasar mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) atau setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

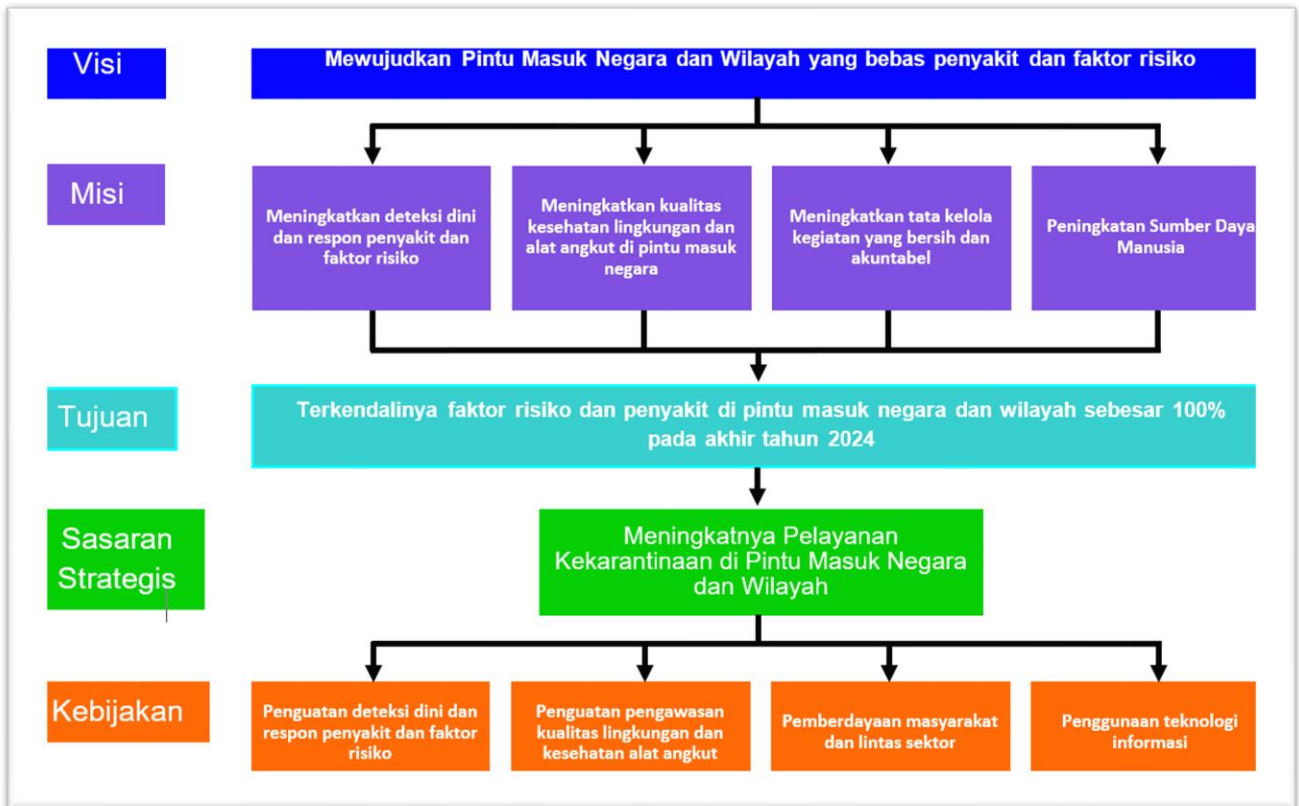
Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Substansi di KKP Kelas I Denpasar Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Denpasar upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1

KERANGKA LOGIS PROGRAM



## Lampiran 2

### MATRIKS TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

#### Matriks Semula

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribuan Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	562.787	607.092	6.070.000	-	-	1,420,192	1,562,211	6.988.969	-	-
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	99%	1,049,559	1,154,515	1.188.914	1.269.966	1.396.963
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	85%	90%	95%	-	-	135,823	149,405	81.100	-	-
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	88	448,932	493,825	19.678.761	21.646.637	23.811.301
5	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	90	92	93	94	95	19,644,684	21,609,152	92.711	101.982	112.180
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	77	78	79	81	123,485	135,834	16.240	17.864	19.650
7	Persentase Peningkatankn kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	65%	75%	81%	82%	336,189	369,808	47.379	52.117	57.329

#### Matriks Menjadi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribuan Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	-	-	0,88	0,89	0,90	-	-	6.988.969	1.718.432	1.890.276

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribuan Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	99%	1,049,559	1,154,515	1.188.914	1.269.966	1.396.963
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	-	-	0,85	0,86	0,87	-	-	81.100	164.346	180.780
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	88	448,932	493,825	19.678.761	21.646.637	23.811.301
5	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	90	92	93	94	95	19,644,684	21,609,152	92.711	101.982	112.180
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	77	78	79	81	123,485	135,834	16.240	17.864	19.650
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	65%	75%	80%	82%	336,189	369,808	47.379	52.117	57.329

### Lampiran 3

## INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN RAK DAN SUMBER DATA

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara.	Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	Laporan Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan.	Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.	Laporan Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.	Indeks dihitung dari 10 parameter yakni Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%; Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal $\leq 1$ ; Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles ( $<1$ ); Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa $<2$ ; Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat $< 2$ ; Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0; Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer $< 1$ ; Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan; Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan; Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	Laporan Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Nilai kinerja anggaran	Definisi operasional indikator ini yaitu nilai kinerja anggaran yang telah	Nilai terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA penilaiannya	Laporan realisasi anggaran, RPK, RPD, Laporan realisasi kegiatan

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
	terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA.	berdasarkan performance budgeting penilaiandan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	nilai terhitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OM SPAN berdasarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Laporan Substansi Tata Usaha
Kinerja implementasi WBK satker	Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.	nilai diperoleh dari hasil perhitungan kertas kerja evaluasi WBK yang dilakukan secara self assesment	Laporan Substansi Tata Usaha, Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
Persentase Peningkatankn kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti	perbandingan jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah pegawai dikali 100%	Laporan rekap pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai KKP Kelas I Denpasar

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
	<p>Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.</p>		

## Lampiran 4

### MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di pintu masuk negara	<p>a. Meningkatkan upaya Kekarantinaan</p> <p>b. Mengefektifkan Surveilans Epidemilogi</p> <p>c. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan</p> <p>d. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko</p> <p>e. Meningkatkan upaya survey vektor dan binatang penular penyakit</p>	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan pelaku perjalanan</li> <li>- Pemeriksaan/Pengawasan Pelaku Perjalanan di Hotel/Lokasi Karantina</li> <li>- Pemeriksaan orang dalam kegiatan Surveilans Migrasi malaria</li> <li>- Pengawasan haji</li> <li>- Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat/Komunitas Bandara/Pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar</li> <li>- Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS</li> <li>- Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP</li> <li>- Pengawasan ABK dan pengemudi saat posko lebaran dan nataru</li> <li>- Pengawasan pemeriksaan crew pesawat</li> <li>- Layanan kesehatan pada Situasi Khusus</li> <li>- Pelayanan kesehatan terbatas di klinik wilker pelabuhan laut dan bandara</li> <li>- Pelayanan pengujian kesehatan bagi komunitas pelabuhan dan bandara</li> </ul>	2022 = 6.988.969; 2023 = 1.718.432; 2024 = 1.890.276

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan penerbitan dan legalisasi ICV</li> <li>- Pemeriksaan Gendec</li> <li>- Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (COP)</li> <li>- Pemeriksaan Kesehatan Kapal</li> <li>- Penerbitan Buku Kesehatan</li> <li>- Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Ship Sanitation Control Exemption Certificat/ Ship Sanitation Control Certificat (SSCEC/SSCC)</li> <li>- Pemeriksaan Alat Angkut dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)</li> <li>- Pengawasan kelengkapan obat P3K</li> <li>- Penerbitan Surat Ijin Lalu Lintas Jenazah (SIAJ)</li> <li>- Penerbitan Sertifikat OMKABA</li> <li>- Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)</li> <li>- Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)</li> <li>- Pemeriksaan sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)</li> <li>- Survei Vektor DBD</li> <li>- Survei Vektor Diare</li> <li>- Survei Vektor Pes</li> </ul>	



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						– Survei Vektor Malaria	
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	<p>a. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko</p> <p>b. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko</p> <p>c. Kerjasama lintas sektor dan program</p> <p>d. Peningkatan komunikasi dan advokasi</p> <p>e. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja</p>	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tindak lanjut hasil pemeriksaan ICV yang tidak valid</li> <li>– Tindak lanjut hasil pemeriksaan suhu penumpang lebih dari 38 oC</li> <li>– Tindak lanjut hasil screening HIV dengan hasil positif</li> <li>– Tindak lanjut hasil screening TB dengan hasil positif</li> <li>– Penanganan ABK/crew dan Pengemudi yang sakit atau dengan FR penyakit</li> <li>– Penanganan pelayanan rujukan</li> <li>– Penanganan kejadian gawat darurat</li> <li>– Penanganan hasil rapid tes Covid-19 Positif</li> <li>– penyehatan kapal baik berupa deratisasi, desinseksi maupun desinfeksi SSCC</li> <li>– Tindak lanjut terhadap barang yang tidak memenuhi syarat</li> <li>– Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor DBD</li> <li>– Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor lalat dan kecoa</li> <li>– Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Pes</li> </ul>	2022 = 1.188.914; 2023 = 1.269.966; 2024 = 1.396.963

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut terhadap kegiatan Survei vektor Malaria</li> <li>Tindak lanjut terhadap kegiatan Uji Resistensi Malaria</li> </ul>	
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama lintas sektor dan program</li> <li>b. Peningkatan komunikasi dan advokasi</li> <li>c. Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit</li> <li>d. Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja</li> </ul>	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelengkapan Data Surveilans</li> <li>Kegiatan Verifikasi Rumor</li> <li>Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE)</li> <li>Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>Indeks Pinjal <math>\leq 1</math></li> <li>Hi Perimeter = 0</li> <li>Hi buffer <math>&lt; 1\%</math></li> <li>Tidak Ditemukan Larva Anopheles</li> <li>Kepadatan Lalat <math>&lt; 2</math></li> <li>Kepadatan kecoa <math>&lt; 2</math></li> <li>TTU Memenuhi Syarat</li> <li>TPM Laik Hygiene</li> <li>Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan</li> </ul>	2022 = 81.100; 2023 = 164.346; 2024 = 180.780
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	Meningkatkan realisasi output dan anggaran dan Pemanfaatan sisa anggaran yang sudah tercapai volume outputnya	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	Monitoring pelaksanaan anggaran	2022 = 19.678.761; 2023 = 21.646.637; 2024 = 23.811.301
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan</li> <li>b. Melakukan revisi DIPA secara selektif.</li> <li>c. Meningkatkan ketelitian dan koreksi dengan pejabat pengelola keuangan</li> </ul>	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen perencanaan</li> <li>Menyusun Rencana Penarikan dan Pencairan dana</li> <li>Membuat dokumen pencairan anggaran (SPM, SPP)</li> </ul>	2022 = 92.711; 2023 = 101.982; 2024 = 112.180

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<p>d. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya dalam halaman III DIPA.</p> <p>e. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.</p> <p>f. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu, yaitu maksimal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).</p> <p>g. Ketepatan waktu dalam revolving UP, minimal 1x dalam 1 bulan dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP), tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP.</p> <p>h. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan berupa upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya.</p> <p>i. Menghindari adanya dispensasi SPM.</p> <p>j. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.</p> <p>k. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.</p> <p>l. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, yaitu maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat dan rekon LPJ Bendahara</li> <li>- Mengajukan Uang Persediaan dan Rupiah Murni dan PNPB</li> <li>- Menyusun revisi halaman III DIPA</li> <li>- Menyusun revisi DIPA</li> <li>- Pengajuan tagihan</li> <li>- Menyusun Laporan Realisasi Anggaran bulanan</li> <li>- Melaksanakan monitoring kinerja anggaran</li> </ul>	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<p>m. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.</p> <p>n. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/ pengembalian SPM oleh sistem di KPPN</p>				
		Kinerja implementasi WBK satker	Membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dan Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBM</li> <li>- Melaksanakan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>- Memenuhi penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen hasil dan komponen</li> </ul>	2022 = 16.240; 2023 = 17.864; 2024 = 19.650

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						<p>pengungkit yaitu Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemenuhan nilai Survey Persepsi Korupsi, dan Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti, serta Kualitas Pelayanan PublikMendorong petugas KKP untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, seminar baik daring maupun luring</p>	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mengikuti peningkatan kapasitas baik secara daring maupun luring.	4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	2022 : 4 wilker (wilker Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, Benoa) 1 Bandara (Bandara I Gusti Ngurah Rai)	Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara luring maupun daring	2022 = 47.379; 2023 = 52.117; 2024 = 57.329